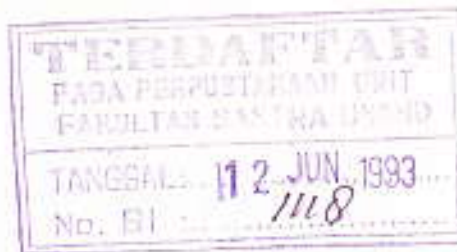


Laporan Penelitian



Sipsis

MIGRASI INTERNAL DAN PERKEMBANGAN
KOTA-KOTA DI INDONESIA :
Kasus Kota Padang

LP.05.04.0124.

oleh:

DRS NURSYIRWAN EFFENDI
(Fakultas Sastra dan Ilmu Sosial
Universitas Andalas - Padang)



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
PUSAT ANTAR UNIVERSITAS ILMU - ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS INDONESIA
(PAU - IS - UI)

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG DAN PERMASALAHAN

Migrasi Internal mungkin bukan merupakan suatu masalah sosial yang serius, namun dampak berantai yang bisa ditimbulkan sebagai konsekuensinya, jelas merupakan suatu masalah yang tidak bisa dianggap ringan. Kecenderungan individu untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan mobilitas yang tinggi dan melewati batas-batas geografis dapat membawa sejumlah konsekuensi pada aspek sosial budaya masyarakat dan secara kewilayahan, areal yang dibutuhkan untuk orientasi mobilitas sosial mengakibatkan dibutuhkannya pengembangan wilayah suatu daerah.

Salah satu konsekuensi mobilitas sosial yang tinggi karena usaha mencari kebutuhan hidup adalah adanya wilayah-wilayah konsentrasi dari aktivitas masyarakat. Misalnya daerah padat sebagai konsentrasi kegiatan ekonomi, akan menghasilkan eksternal cost, seperti polusi dan kemacetan lalu lintas, karena sebagian arus kendaraan yang rutin menuju satu lokasi. Masalah lainnya terlihat pada gejala perpindahan tempat tinggal (migrasi permanen). Gejala ini sebetulnya bukan

merupakan perpindahan fisik semata, tetapi juga perpindahan sosial dari suatu komunitas ke komunitas baru. Dampak yang mungkin timbul dari migrasi ini adalah perlunya penyesuaian yang berulang kali dari individu yang pindah dari komunitas lama ke komunitas baru. Hal ini disebabkan individu tersebut melakukan proses pembentukan solidaritas sosial baru berdasarkan komposisi penduduk yang baru dimana ia berada. Sedangkan bagi Pemerintahan kota, perpindahan penduduk dari satu lokasi ke lokasi lain dalam wilayah kota yang sama memerlukan suatu keputusan untuk mengembangkan wilayah agar sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh warga yang bermigrasi dapat tersedia.

Dari kenyataan di atas, jelas terlihat bahwa migrasi internal yang ada di kota merupakan suatu persoalan yang muncul sebagai bagian dari kehidupan kota yang semakin kompleks dimana di dalamnya terdapat beragam aktivitas serta kepentingan yang berbeda dari setiap anggota masyarakatnya.

Terkait dengan pemikiran terjadinya migrasi internal dan pengembangan wilayah kota sebagai dampak dari kebutuhan akan prasarana dan sarana kota, Kota Padang agaknya juga mengalami hal demikian. Kota Padang dipandang sebagai salah satu daerah tingkat dua di Provinsi Sumatera Barat yang sangat berperan penting di dalam proses pembangunan daerah ini, karena fungsinya yang

jamak yakni sebagai barometer bagi pembangunan provinsi ini dan juga sebagai penggerak akslerasi pembangunan propinsi Suamtera Barat.

Sebagai ibukota Provinsi, kota padang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, industri dan pariwisata. Selain itu kota ini juga menjalankan fungsinya untuk melayani kebutuhan penduduknya melalui penyediaan fasilitas seperti gedung perkantoran, pemukiman, sarana pendidikan, air bersih, pelayanan kesehatan, jasa transportasi, tempat hiburan dan lokasi pariwisata.

Dengan luas 694.95 km persegi dan jumlah kecamatan 11 buah serta 193 buah kelurahan, Kota Padang dewasa ini berpenduduk sekitar 574.603 jiwa (Sensus Penduduk 1990) dan jumlah KK 117.460. Dengan beban populasi dan wilayah yang sedemikian, kota ini terlihat sedang berkembang menuju kategori kota-kota Yang Sedang Berkembang, artinya tipe kota yang sedang menuju kota metropolitan. Konsekuensinya berbagai masalah perko-taanpun muncul. Seperti terjadinya kepadatan penduduk yang tidak merata, akibat penyebaran penduduk yang cenderung ke pusat kota. Diketahui sementara ini wilayah kecamatan di kota Padang yang tergolong padat adalah Kecamatan Padang Barat, Padang Timur, dan Koto Tengah. Secara umum, kepadatan penduduk adalah 819 jiwa per kilometer persegi, sedangkan di pusat kota mencapai

BAB III

PENGEMBANGAN WILAYAH KOTA PADANG

1. Kondisi Dasar Pengembangan Wilayah Kota

Gambaran Umum Kota

Kotamadya Padang, yang merupakan ibukota propinsi Sumatera Barat, terletak pada ketinggian 1-5 meter di atas permukaan laut pada posisi terendah dan 100 meter pada bagian tertinggi. Lokasi kota yang berada di daerah pantai (*coastal urban area*) menyebabkan kota ini terasa terik pada siang hari, karena suhunya dapat mencapai titik tertinggi sekitar 32-33° celcius, namun rasa sejuk di malam hari cukup terasa dengan suhunya yang mdapat mencapai 20° celcius. Namun suasana panas yang menyelimuti kota ini bukan hal yang luar biasa karena hal ini juga dialami kota-kota lain yang berlokasi di wilayah pantai. Walaupun begitu mungkin kota Padang agak sedikit berbeda dengan yang lainnya terutama dalam hal iklimnya yang termasuk ke dalam tipe *afa* (*smiter erguson*), yakni iklim basah dimana tidak ada bulan-bulan yang benar-benar kering tanpa curah hujan, sehingga kota Padang senantiasa diguyur hujan setiap bulannya. Dan persoalan curah hujan yang senantiasa turun dan tidak jarang tercurah melebihi biasanya

KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan dari uraian bab-bab sebelumnya dapatlah dikatakan bahwa ada hubungan antara variabel migrasi internal dengan variabel perkembangan kota. Migrasi internal dipandang sebagai aspek dinamis dari perkembangan kota karena adanya tuntutan yang semakin meningkat dari masyarakat terhadap kehidupannya menuju ke keadaan yang lebih baik. Sedangkan Perkembangan kota bisa dilihat sebagai efek lanjutan dari adanya migrasi internal tersebut.

Kondisi masyarakat yang statis menciptakan suatu opini umum tentang kesejahteraan. Mereka yang memandang bahwa kesejahteraan itu bisa diperbaiki dengan adanya kondisi lingkungan yang baik, akan pergi berpindah mencari daerah dengan kondisi yang lebih baik tersebut. Pandangan serupa ini menjadi salah satu dasar analisis terjadinya migrasi internal, dimana ada alasan daerah asal dan daerah tujuan sebagai pedoman penilaian untuk melakukan perpindahan atau mobilitas. Daerah asal adalah salah satu sisi yang dipakai oleh pelaku migrasi di dalam menciptakan perpindahan. Apabila daerah asal tidak bisa memberikan keadaan yang lebih baik, mereka akan mencari daerah lain yang lebih memungkinkan untuk hidup lebih layak. Daerah lain ini disebut daerah tujuan. Namun daerah tujuanpun akan juga diperhatikan

oleh pelaku migrasi untuk memilihnya. Apakah daerah tujuan telah mampu memberikan apa yang diinginkan oleh mereka. Bila terpenuhi maka daerah tersebut akan menjadi pilihan daerah tujuan bermigrasi.

Dua faktor di atas yaitu faktor daerah asal dan daerah tujuan dapat dikategorikan sebagai kondisi eksternal dari terciptanya pola migrasi internal. Selain faktor daerah asal dan daerah tujuan tadi, dua faktor lainnya yaitu faktor rintangan dan pribadi dikategorikan sebagai kondisi internal dari migrasi .

Kondisi internal lebih menyangkut kepada kemampuan dan keputusan pelaku untuk bermigrasi. Di dalam faktor daerah tujuan dan daerah asal ada kondisi-kondisi yang negatif dan positif. Pertimbangan untuk memandang faktor negatif terhadap daerah tujuan akan menciptakan rintangan pribadi dari pelaku sehingga mereka tetap tinggal di daerah asalnya. Sebaliknya apabila pelaku lebih memandang kondisi negatif yang lebih banyak terdapat di daerah tujuan, maka akan memungkinkan pelaku untuk juga tetap tinggal di daerah asal. Disisi lain apabila pelaku lebih memandang kondisi positif di daerah tujuan dan memandang negatif pada daerah asal maka akan lebih besar kemungkinan pelaku untuk berpindah tempat.

Rintangannya yang dihadapi dalam bermigrasipun juga bergantung kepada pandangan positif dan negatif dari daerah tujuan maupun daerah asal. Apabila pelaku lebih banyak memandang negatif kondisi daerah asal berarti ia makin merasakan rintangannya untuk tetap tinggal di daerah asal. Efek dari pandangan ini akan menyebabkan mereka pergi mencari daerah lain yang mereka anggap memiliki kondisi yang positif.

Keempat faktor di atas yaitu daerah asal, daerah tujuan, rintangan dan pribadi membentuk jaringan sistem dari pola migrasi internal di perkotaan. Pola ini akan semakin dinamis bila dihubungkan dengan terciptanya suatu bentuk perkembangan kota yang kondusif.

Perkembangan kota menyangkut aspek fisik dari kota yang menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan warganya untuk dapat tetap bertahan dalam kondisi minimal kelayakan hidup. Penciptaan perkembangan kota tidaklah bisa dibentuk dari kondisi yang terjadi karena tuntutan pelaku, seperti halnya migrasi internal. Perkembangan kota, melainkan, terjadi karena suatu tuntutan sistem dari perkembangan masyarakat yang terus berubah. Untuk menyalurkan perkembangan ini perencanaan kota adalah satu usaha yang paling memungkinkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda Kodya Padang
RUTRK Kotamadya Padang 1983-2003. Padang: Bappeda
Kodya Padang, 1984
- Biro Pusat Statistik
Padang Dalam Angka 1990. Padang: Kantor
Biro Pusat Statistik Kodya Padang, 1990.
- Evers, Hans-Dieter
Sosiologi Perkotaan: Urbanisasi dan Seng-
keta Tanah Di Indonesia dan Malaysia.
Jakarta: LP3ES, 1986.
- Manning, Chris dan Tajoeddin N. Effendi
Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di
Kota.
Jakarta: Yayasan Obor, 1985.
- Nas, Peter J.M.
Kota Di Dunia Ketiga. Jakarta: Bharata Karya
Aksara, 1979.